



PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA

DAULAH ABBASIYAH

Rahmawati¹, Nasrullah², Mukhtar Lutfi³, Syarigawir⁴, Salam⁵

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar

^{4,5}Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: rahmanrahmawati951@gmail.com,

Tlp: +6282347586658

Abstrak

Para ahli sejarah menganggap masa Dinasti Abbasiyah sebagai masa keemasan umat Islam, saat peradaban Islam berada di puncak perkembangannya. Di banyak tempat di seluruh dunia, peradaban Islam baru tersebut menjadi model bagi peradaban lain. Pada masa Abbasiyah, kajian ekonomi Islam memperoleh tempat yang menonjol dan populer. Fokus utama kajian tersebut adalah perpajakan dan pembiayaan negara. Dominasi Dinasti Umayyah dilanjutkan oleh para pemimpin Dinasti Abbasiyah. Karena para pendiri dan penguasa dinasti tersebut merupakan keturunan Abbas, saudara dari ayah Nabi Muhammad SAW, maka dinasti tersebut dijuluki Abbasiyah. Abdullah al-Abbas, yang lahir di Humaimah pada tahun 104 H dan memangku jabatan khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awwal 132 H, mendirikan Dinasti Abbasiyah. Dari tahun 750 hingga 1258 M, Dinasti Abbasiyah berkuasa.

Kata Kunci: *Daulah Abbasiyah, Pemikiran, Ekonomi Islam*

1. Pendahuluan

Sejarah ekonomi Islam dimulai saat Nabi Muhammad SAW memperkenalkannya dan berlanjut pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebagai hasil dari kontribusi penting para nabi terhadap dunia Arab, Islam telah memberikan dampak substansial pada dunia saat ini. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah muncul setelah runtuhnya Khulafaur Rasyidin (Umayyah Dan dan Bani Abbasiyah, 2020:66). Selama era Islam, keluarga penguasa ketiga adalah Dinasti Abbasiyah. Periode ini dianggap oleh para sejarawan sebagai zaman keemasan Muslim, yang menandakan puncak pertumbuhan peradaban Islam.

Selama masa ini, peradaban Islam baru muncul, yang menjadi model bagi berbagai kota di seluruh dunia. Selama Dinasti Abbasiyah, Baghdad menjadi



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

episentrum penyelidikan ilmiah, sehingga menjadi titik fokus bagi isu-isu budaya, sosial, dan politik. Daulay, Haidar Putra (2021:228)

Kekhalifahan Abbasiyah, yang berdiri sejak 132 H (750 M) hingga 657 H (1075 M), mencapai puncaknya di sejumlah bidang, termasuk pemerintahan, sistem ekonomi, sains, dan keuangan. Banyak disiplin ilmu yang maju selama masa ini dan menghasilkan ratusan buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada 750 H, Dinasti Umayyah digulingkan oleh Dinasti Abbasiyah.

Dinamai berdasarkan keluarganya, kekhalifahan ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah, cucu al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. (Ridwanto, 2023)

Khilafah Abbasiyah yang berdiri pada tahun 132 H (750 M) dan bertahan hingga tahun 657 H (1075 M) mencapai puncak kejayaannya di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, sistem ekonomi, sains, dan keuangan. Berbagai disiplin ilmu berkembang pesat pada masa itu dan menghasilkan ratusan buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 750 H, Dinasti Umayyah digulingkan oleh Dinasti Abbasiyah. Abdullah al-Saffah, paman Nabi Muhammad SAW dan cucu al-Abbas, mendirikan kekhalifahan yang menyanggah nama keluarganya ini. (Ridwanto, 2023)

2. Metode

Studi kasus, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk artikel ini. Lebih tepatnya, model Pendekatan memudahkan untuk meneliti berbagai buku, karya tulis, artikel, jurnal akademis, dan tulisan jurnalistik yang bersumber dari perpustakaan. Langkah kedua melibatkan pengumpulan berbagai data, yang kemudian diperiksa dan diproses secara cermat dan tepat untuk menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi.

3. Hasil dan Pembahasan A.

Berdirinya Daulah Abbasiyah

Sering disebut sebagai Zaman



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Keemasan Islam, Kekhalifahan Abbasiyah atau Dinasti Abbasiyah adalah masa yang sangat luar biasa dalam sejarah. Mempelajari zaman ini menarik karena sejumlah alasan. Pertama, perpindahan kekhalifahan dari Dinasti Umayyah yang singkat ke Dinasti Abbasiyah yang lebih lama menandai dimulainya era ini. Lebih jauh lagi, kekaisaran Islam mencapai dominasi geografisnya yang paling kuat dan luas selama masa ini. Tingkat urbanisasi tertinggi dan perluasan perdagangan Islam dari India di Timur ke Spanyol di Barat adalah karakteristik lainnya. Tingkat administrasi pemerintahan dan kemajuan budaya yang tinggi juga berada di bawah kendali kekaisaran Islam. Terakhir, publikasi ilmiah tentang masalah ekonomi awalnya muncul dalam penelitian khusus selama era Abbasiyah (Abdul Qoyum et al., 2021). Dominasi Dinasti Umayyah dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah. Karena kerajaan atau dinasti ini diperintah



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

oleh Al-Abbas, saudara laki-laki ayah Nabi Muhammad SAW, maka pemerintahan ini dikenal dengan nama Khilafah Abbasiyah (Sapriadi et al., 2021).

Dinasti ketiga dalam sejarah kebudayaan Islam adalah Dinasti Abbasiyah. Para ahli sejarah menyebut periode ini sebagai "zaman keemasan umat Islam" karena merupakan puncak perkembangan peradaban Islam. Keberadaan peradaban Islam baru menjadi buktinya dan menjadi model bagi peradaban di tempat lain di seluruh dunia. Dimulai pada tahun 132 H/750 M dan berakhir pada tahun 657 H/1075 M, Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang mencapai puncak kejayaannya dalam sejumlah bidang, termasuk ilmu pengetahuan, ekonomi, kekayaan, dan kekuasaan. Banyak bidang akademik yang berkembang selama masa ini, dan ratusan atau bahkan ribuan volume diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada saat itu. Pada tahun 750 H, pemerintahan Umayyah digulingkan, dan Abbasiyah mengambil alih kedaulatan Islam. Khilafah tersebut disebut Khilafah Abbasiyah karena para pendirinya merupakan keturunan al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas mendirikan negara ini. Teori Ekonomi Islam di Era Daulah Abbasiyah. Kekuasaan Daulah Abbasiyah adalah untuk memperpanjang kekuasaan Daulah Umayyah. Disebut Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa Daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abdullah alSaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbass adalah pendiri

Daulah Abbasiyah. Pada tahun 104 H, ia lahir di Humaimah. Pada tanggal 3 Rabiul Awwal 132 H, ia dinobatkan sebagai Khalifah. Dari tahun 750 hingga 1258 M, Daulah Abbasiyah berkuasa.



B. Faktor-Faktor Berdirinya Daulah Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah berdiri karena beberapa hal yang melemahkan pemerintahan sebelumnya, antara lain:

1. Perjuangan politik antara pengikut setia Ali bin Abi Thalib (partai Syiah) dan Bani Umayyah.
2. Kelompok Khawarij terbentuk sebagai akibat dari kebijakan reforma agraria yang tidak adil dan persaingan politik antara Syiah dan Muawiyah.
3. Menggunakan metode non-kekerasan untuk menyelesaikan pertikaian kekhalfahan.
4. Gagasan bahwa tindakan politik harus dipahami berdasarkan Al-Qur'an dan kelompok Khawarij yang merupakan Muslim non-Arab
5. Menurut perspektif hijrah, setiap orang harus menjadi anggota kelompok Khawarij, yang dianggap sebagai satu-satunya kelompok yang dapat memasuki dar al-Islam.
6. Pemberontakan sengit penganut Syiah melawan Dinasti Umayyah menyusul kekalahan Hussein bin Ali dalam Pertempuran Karbala.
7. Ketidakcocokan umat Islam Arab dan non-Arab disebut dengan mawali (Ajid.Pdf, 2021).

Pertumbuhan ekonomi dipercayakan kepada individu terdidik dan spesialis ekonomi di bawah Dinasti Abbasiyah karena keyakinan mereka yang kuat dalam penciptaan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai negara muda dengan wilayah yang luas, sulit untuk mengendalikan kehidupan setiap orang untuk mewujudkan kemakmuran. Perbendaharaan negara lebih dari cukup, jika tidak berlimpah, pada tahun-tahun awal Dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan pemerintah jauh lebih tinggi daripada pengeluaran. Hasibuan (2021) Khalifah al-



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Mansur memegang tampuk kekuasaan saat itu. Ekonomi dan keuangan negara telah ditetapkan dengan kuat oleh Khalifah al-Mansur. Al-Mansur lebih unggul daripada Khalifah Umar bin Khattab dalam membentengi Islam karena ia memimpin Dinasti Abbasiyah dengan rencana politik yang tajam dan pikiran yang cemerlang. Perdagangan juga sangat penting bagi para Khalifah Dinasti Abbasiyah. Membangun armada perdagangan, membangun tempat istirahat dan sumur di jalan raya yang dilalui para pedagang, dan membangun armada untuk mempertahankan pantai dari serangan bajak laut semuanya merupakan upaya untuk mempromosikan perdagangan. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Dinasti Abbasiyah di sektor perdagangan. Dinasti Abbasiyah memiliki sejumlah sumber dana negara tambahan selain sektor ekonomi yang telah dibahas sebelumnya sebagai sumber devisa negara. Sumber-sumber tersebut antara lain zakat, jizyah, fa'i, ghanimah, dan lain-lain, yang semuanya dikelola secara profesional pada masa itu, yang masing-masing memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi lokal pada masa itu. (Alimuddin dkk., 2022)

C. Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah

Teori Ekonomi Islam pada Periode Abbasiyah Dimulai pada era Abbasiyah, studi ekonomi Islam mulai populer dan menjadi subjek banyak penelitian. Keuangan negara dan pajak menjadi fokus utama. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti semakin kompleksnya masalah negara yang diakibatkan oleh perluasan negara, pergeseran kepemilikan tanah dan struktur kendali antara Muslim dan non-Muslim, munculnya pertanian sebagai sumber utama pendapatan negara yang menarik minat para cendekiawan Muslim untuk memungut pajak tanah, sifat masalah ekonomi yang memerlukan fokus teoritis dan praktis pada kesetaraan, dan fakta bahwa beberapa penulis awal kemudian menjadi hakim atau ahli hukum. Salah satu topik yang membahas sejumlah masalah yang berkaitan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dengan kebijakan ekonomi negara adalah keunikan pajak. Karena Islam tidak membedakan antara agama dan politik, pajak memiliki komponen politik, yang merupakan masalah mendasar dalam keimanan. bantuan dari sejumlah khalifah dan pemimpin negara yang menugaskan tugas yang mirip dengan tugas "komite investigasi" kontemporer. Pada tahun 2021, Abdul Qoyum dkk. Sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, khalifah tidak membuat atau menegakkan hukum yang berkaitan dengan keuangan negara di seluruh Dinasti Abbasiyah. Hakim ahli dan spesialis hukum (fuqaha) melaksanakan peraturan dan pelaksanaannya. Upaya para raja untuk memikat para ulama agar bergabung dengan lingkaran istana merupakan fenomena yang paling menonjol pada masa itu. Selama Dinasti Abbasiyah, khalifah menyadari kurangnya bakat akademisnya dan merekrut para intelektual ke istana.

Pernyataan ini didukung oleh empat faktor: yang pertama adalah pertumbuhan wilayah Islam; yang kedua adalah perpecahan dalam negara; yang ketiga adalah lamanya waktu sejak kenabian; dan yang keempat adalah meningkatnya kompleksitas kehidupan. Dalam pengertian ini, beberapa komunitas—para akademisi atau fuqaha—memiliki pemahaman yang lebih besar tentang agama. Selama Dinasti Abbasiyah, ilmu fiqh dan fuqaha berkembang sangat cepat. Dengan cara ini, ilmu fiqh telah berkembang menjadi sejumlah paradigma, teknik, dan prosedur. Kesimpulannya adalah bahwa beberapa mazhab fiqh berkembang di seluruh Dinasti Abbasiyah. Mazhab-mazhab fiqh ini kemudian juga memberikan dampak yang signifikan terhadap teori ekonomi. Mazhab-mazhab ini sering kali memunculkan berbagai penafsiran dan gagasan tentang topik fiqh yang sama. Penyebab utama dari perbedaan proses berpikir ini adalah penerapan paradigma, teknik, atau metodologi yang berbeda.

D. Tokoh-tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Masa daulah Abbasiyah

1. Abu Yusuf



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

a. Biografi

Nama lengkap ulama ini adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Ia lahir di Kufah pada tahun 113 H atau 731 M. Pada tahun 182 H atau 798 M, Abu Yusuf meninggal dunia di Baghdad. (Husein, 2023)

Selain mengulas sumber-sumber dana pemerintah—kharaj, jizyah, 'usyr, ghanimah, fai', shadaqah, dan zakat—yang digunakan untuk mengelola baitul maal pada masa itu, karya Abu Yusuf yang berjudul Al-Kharaj merupakan karya luar biasa yang menawarkan kajian menyeluruh. Tuntutan, arahan, dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid tentang berbagai masalah sistem perpajakan menjadi dasar penulisan Kitab Al-Kharaj oleh Abu Yusuf. Karena ditulis atas permintaan dan keinginan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menggunakannya sebagai pedoman administrasi lembaga pengelolaan keuangan atau Baitul Mal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan negara dan warga negaranya, maka karya al-Kharaj berorientasi pada birokrasi. Pada tahun 2021, Abdul Qoyum dkk.

b. Pemikiran Ekonomi

Menurut penalarannya, variabel yang disorot dalam kasus ini adalah negara dan aktivitas ekonomi. Kesejahteraan rakyat merupakan tugas utama negara, sehingga menjadi kewajibannya untuk mengarahkan proyek-proyek dengan cara yang memajukan kesejahteraan umum. Misalnya, negara bertugas membangun saluran irigasi, menghubungkan jalan raya, dan infrastruktur publik lainnya. Topik keuangan publik merupakan inti dari filosofi Abu Yusuf. Melalui pengamatan dan analisis yang cermat, Abu Yusuf mengklarifikasi masalah pengelolaan dana dan mengusulkan sejumlah kebijakan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang berkembang.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Pada tahun 2021, Abdul Qoyum dkk. Penentangannya terhadap penetapan harga dan pengendalian pemerintah menunjukkan pemikirannya yang kontroversial. Di zaman Abu Yusuf, banyak yang percaya bahwa harga produk secara alami akan naik jika terjadi kelangkaan dan turun jika terjadi kelimpahan. Namun, ia tidak setuju, dan berpikir bahwa kenaikan harga tidak selalu dipengaruhi oleh kurangnya komoditas, dan penurunan harga tidak selalu merupakan hasil dari kelimpahan barang. Ia menegaskan bahwa permintaan pasar dan juga penawaran barang mempengaruhi harga. Akibatnya, pergeseran permintaan komoditas tidak serta merta mempengaruhi penyesuaian harga. Menurut Abu Yusuf, aktivitas ekonomi merupakan fenomena dinamis yang merupakan hasil dari usaha kolektif masyarakat Islam.

Signifikansi dan intensitas sejumlah faktor yang memacu pertumbuhan dan percepatan ekonomi bervariasi. Langkah pertama adalah memenuhi hukum tertinggi sehingga, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, seseorang dapat mengambil alih. Kedua, berusaha memenuhi tuntutan material primer dan sekunder. Ketiga, niat atau usaha penguasa. Fenomena ekonomi tidak selalu memiliki hubungan kausal langsung, menurut Abu Yusuf. Ia menegaskan bahwa ada dua tahap sumber ekonomi yang berbeda, yaitu:

- 1) Tanah dan air adalah contoh bahan alami yang ditemukan pada tahap pertama. Sumber daya ini kuat, mandiri, dan terjadi secara alami.
- 2) Tenaga kerja merupakan tahap kedua. Pemeliharaan, pemanfaatan lahan, pembangunan saluran air, dan kegiatan lainnya merupakan contoh dari fungsi yang agak tidak efisien dan pelaksanaannya tidak teratur pada tahap ini.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Abu Yusuf membuat sejumlah strategi untuk melaksanakan reorganisasi sistem ekonomi negara Baghdad, antara lain::

- 1) Sistem Muqassamah menggantikan Sistem Wazifah. Metode pemungutan pajak disebut wazifah dan muqassamah. Berbeda dengan sistem muqassamah yang mempertimbangkan kemampuan dan persentase pendapatan wajib pajak, sistem wazifah mendasarkan pemungutan pajak pada nilai tetap tanpa mempertimbangkan kemampuan wajib pajak.
- 2) Perkembangan gagasan elastisitas sosial. Penduduk nonMuslim di Dar al-Islam dijamin perlindungan hukum dari otoritas Islam, meskipun faktanya hukum Islam mengakui Muslim sebagai individu yang sepenuhnya mampu. Setiap Muslim terikat oleh hukum Islam dan memiliki semua hak sebagai warga negara, namun hak setiap orang mungkin berbeda berdasarkan kepentingan dan hubungan mereka.
- 3) menciptakan struktur politik dan ekonomi yang transparan. Ketika Abu Yusuf menyebut pendapatan negara termasuk ghanimah dan fai' sebagai pendapatan insidental, terlihat jelas betapa terbukanya dia. Dari kekayaan yang dia bagikan, empat bagian diberikan kepada tentara, dan seperlima disimpan dalam kas rakyat, atau baitulmal, untuk kepentingan rakyat.
- 4) membangun sistem ekonomi yang mandiri. Penentangan Abu Yusuf terhadap keterlibatan pemerintah dalam penetapan harga dan regulasi merupakan indikasi keinginannya untuk membangun sistem ekonomi yang otonom. Dalam hal ini, ia menyatakan pandangan bahwa ada lebih banyak faktor penentu daripada jumlah komoditas, yang tidak dapat menjadi penyebab utama perubahan harga.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- 5) Penjelasan Abu Yusuf tentang pendapatan negara—termasuk ghanimah dan fai' sebagai pendapatan insidental—dari distribusi kekayaan yang dilakukannya menunjukkan terciptanya tatanan politik dan sistem ekonomi yang terbuka. Selain itu, Abu Yusuf memberikan empat bagian kepada tentara dan seperlimanya kepada kas rakyat, atau baitulmal, untuk kepentingan mereka. Penolakan Abu Yusuf terhadap keterlibatan pemerintah dalam penetapan dan pengendalian harga merupakan indikasi realisasinya terhadap sistem ekonomi yang otonom. Ia berpendapat bahwa faktor-faktor lain memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan harga daripada jumlah barang yang diproduksi. (Yulianti, Ahmani Timorita, 126).

2. Al-Syaibani

a. Biografi

Ekonom Islam Al-Syaibani lahir di Wasith pada tahun 132 H (750 M). Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Farqad Al-Syaibani. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, Al-Syaibani menghasilkan sejumlah gagasan dan tulisan penting, namun karyanya yang paling luar biasa dan kolosal adalah Kitab Al-Kasb. Adiwarmanto (2004)

b. Pemikiran Ekonomi

Al-Syaibani memberikan wawasan ekonomi mikro dalam Kitab Al-Kasb. Setelah menjelaskan teori dan sumber uang, buku ini membahas aturan yang mengatur perilaku produksi dan konsumsi. Kegiatan-kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

produksi dalam ekonomi. Al-Syaibani memiliki berbagai ide ekonomi, yaitu:

1) Al-Kasb (kerja)

Dalam Islam, mencari nafkah atau pekerjaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang telah dewasa agar sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Oleh karena itu, seorang suami harus dengan ikhlas memenuhi kewajiban ini agar dapat menafkahi keluarganya. Dalam mengejar rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, semua makhluk hidup harus aktif, tekun, dan mengerahkan segenap tenaga untuk bekerja agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

2) Konsep Kekayaan dan Kefakiran

Al-Syaibani berpendapat bahwa tindakan orang miskin memiliki status yang lebih tinggi, meskipun ada banyak literatur yang menjelaskan keutamaan kekayaan. Ia bahkan mengatakan bahwa ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan kemudian berkonsentrasi pada berkat-berkat yang telah diterimanya sambil memperhatikan urusan akhirat, itulah yang paling penting baginya. Dalam hal ini, karakteristik dan tindakan orang miskin dipahami sebagai keadaan yang cukup dan cara untuk menghindari perasaan tidak mampu.

3) Klasifikasi Usaha-Usaha

Menurut Al-Syaibani, kegiatan ekonomi dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok: perdagangan, industri, pertanian, dan sewa guna usaha. Meskipun demikian, banyak ekonom kontemporer kini



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

mengkategorikannya ke dalam tiga kelompok: industri, jasa, dan pertanian. Sementara itu, para analis mengatakan bahwa kegiatan perdagangan merupakan bagian dari upaya pengabdian.

4) Kebutuhan Kebutuhan

Al Syaibani menjelaskan bahwa meskipun manusia adalah makhluk yang tubuhnya tidak dapat menopang dirinya sendiri, namun Allah SWT telah menciptakannya dengan empat kebutuhan: makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Menurut para ekonom, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keempat hal tersebut.

5) Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan

Prinsip utama teori ekonomi Al-Syaibani adalah spesialisasi dan distribusi tenaga kerja. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan tidak saling membutuhkan, katanya, dan mereka pasti saling membutuhkan dalam kehidupan mereka. Manusia tidak mampu menguasai setiap ilmu yang dibutuhkan selama hidup mereka.

(Cirebon, Syekh, dan Addin)

3. Abu Ubaid

a. Riwayat hidup singkat

Abu Ubaid lahir di Bahrah (Harat) di provinsi Khurasan (barat laut Afghanistan) pada tahun 154 H. Nama lengkapnya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid alAzdhi. Abu Ubaid hidup pada masa Dinasti Abbasiyah, yang dimulai dengan Khalifah al-Mahdi (158/775 M), menurut sejumlah sumber literatur. (Sumber: Muslim, 2022)

b. Pandangan ekonomi



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Buku Abu Ubaid yang luar biasa, *Al-Amwal*, berupaya menjelaskan teologi Islam dalam konteks usaha manusia pada umumnya. Ide-idenya berpusat pada pembelaan terhadap distribusi kekayaan yang adil dan setara yang didasarkan pada gagasan keadilan fiskal. Menurut Abu Ubaid, segala jenis hibah atau hadiah yang diberikan negara atau pemerintah kepada orang atau organisasi perlu ditentukan oleh seberapa besar komitmen mereka terhadap masyarakat.

Kebutuhan untuk menegakkan dan melindungi hak dan tanggung jawab rakyat tercermin dalam filosofi ekonomi Abu Ubaid, yang menekankan perlunya persatuan dan tanggung jawab bersama sambil menggunakan istilah keadilan sebagai landasan utama bagi peraturan pemerintahan. Lebih jauh, Abu Ubaid menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa penguasa masyarakat Islam harus menjamin bahwa setiap orang memiliki tingkat kehidupan yang layak dan memadai. Ia berpendapat bahwa uang harus memiliki nilai inheren sebagai alat tukar dan bahwa negara harus mengawasi dan mendistribusikan pendapatan kepada rakyat. Nilai uang serta alat perdagangan. Menurutnya, hanya dinar dan dirham yang dapat digunakan sebagai alat tukar karena nilainya yang stabil, sehingga dapat mencegah inflasi dan merugikan perekonomian negara. Semua sumber pendapatan, baik yang dikelola secara pribadi, kolektif, maupun pemerintah, yang dikelola untuk kepentingan rakyat, termasuk dalam keuangan publik.

4. Pemikiran ekonomi Yahya Bin Umar a. Biografi

Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani AlAndalusi adalah nama lengkap Yahya bin Umar yang lahir



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

pada tahun 213 H dan dibesarkan di Cordova, Spanyol. Kemudian, pada tahun 289 H atau 901 M, Yahya bin Umar meninggal dunia.

b. Pemikiran ekonomi

Yahya bin Umar berpendapat bahwa agama dan ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi tradisional adalah keyakinan bahwa ketakwaan seorang muslim merupakan suatu prinsip. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kajian tas'ir (penentuan harga) mencerminkan penekanan Yahya bin Umar pada hukum pasar. Jika kenaikan harga terjadi karena interaksi alami antara penawaran dan permintaan, Yahya bin Umar melarang penerapan kebijakan penentuan harga (al-tas'ir). Akibatnya, kepala negara tidak memiliki kewenangan untuk memengaruhi harga dalam situasi tersebut. Namun, jika kesalahan manusia menjadi penyebab kenaikan harga, pemerintah bertugas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan berwenang untuk mengendalikan harga jika suatu kegiatan mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Kepala negara tidak diperbolehkan untuk campur tangan, menurut Yahya bin Umar, yaitu:

- 1) Barang-barang tertentu yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat disimpan di pasar untuk dijual oleh pedagang, yang dapat menyebabkan kerusakan dan melemahkan dinamika pasar internal.
- 2) Siyasa al-ighraq, atau dumping, merupakan perilaku yang dilakukan oleh para pedagang. Perilaku ini dapat



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

menyebabkan persaingan yang berlebihan dan tidak merata serta volatilitas harga pasar. (Marasabessy, 2022)

5. Pemikiran ekonomi Al-Mawardi

a. Riwayat hidup singkat

Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi AlBasri Al-Syafi'l adalah nama lengkap Al-Mawardi. Pada tahun 364 H atau tahun 974 M, beliau dilahirkan di Basrah. Pada usia 86 tahun, Al-Mawardi meninggal dunia di Bagdad pada tahun 450 H atau 1058 M. Lubis, Arifin (2024)

b. Pemikiran ekonomi

Pada dasarnya, setidaknya ada tiga karya Al-Mawardi Adab ad-Dunya wa ad-din, al-Hawi, dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah yang memuat filsafat ekonominya. Empat mata pencaharian utama pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri serta perilaku dan pandangan ekonomi Muslim dibahas dalam buku Ad-dunya wa ad-din. (Ahabuddin, 2022) Beberapa contoh teori ekonomi al-Mawardi yang memajukan ekonomi Islam meliputi berikut ini:

1) Negara dan Aktivitas Ekonomi

Al-Mawardi menggarisbawahi bahwa imamah, atau kepala suatu wilayah, berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan mandat kenabian untuk mengendalikan wilayah dan menegakkan Islam. Meskipun mengendalikan wilayah dan memelihara agama adalah dua jenis kegiatan yang berbeda, keduanya tetap saling terkait dalam hal ini. Akibatnya, negara secara aktif berkontribusi terhadap



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

pencapaian tujuan material dan spiritual. Pemerintah memiliki kewajiban moral untuk membantu mencapai kebaikan bersama, yang mencakup menegakkan kepentingan masyarakat dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Karena individu tidak mampu membayar layanan publik sendiri, negara harus mengendalikan dan mendanai pengeluaran tersebut. Akibatnya, layanan publik harus didasarkan pada kebaikan bersama dan merupakan kewajiban sosial.

2) Pinjaman umum

Hukum Islam memperbolehkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di masa lampau untuk menutupi defisit anggaran. Namun, hadis maupun literatur hukum tidak menyebutkan secara spesifik. Hal ini mendorong Al-Mawardi untuk berbicara tentang syarat dan ketentuan yang memperbolehkan pinjaman publik. Karena ia melihat adanya perbedaan antara pembiayaan operasi pemerintah dan pendanaan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, Al-Mawardi mendukung pinjaman publik.

3) Perpajakan

Al-Mawardi memiliki pandangan yang sedikit berbeda tentang pajak dibandingkan perspektif klasik pada masanya. Menurutnya, pemungut pajak harus mempertimbangkan setidaknya empat faktor saat menentukan kharaj: spesies tanaman, sistem irigasi, produksi lahan, dan jarak antara pasar dan area yang terkena kharaj. Hanya dengan demikian keadilan akan ditegakkan bagi para pembayar pajak.



4) Lembaga Keuangan Negara (Baitul Maal)

Al-Mawardi berpendapat bahwa negara harus mendirikan dan mengelola lembaga keuangan negara (Baitul Maal) untuk memenuhi kebutuhan dasar semua warga negara. Hal ini untuk menjamin agar uang negara dari berbagai sumber dialokasikan sesuai dengan ketentuan masing-masing dan tidak tercampur aduk.

5) Konsep Keadilan

Keadilan memiliki konotasi yang tinggi dalam Islam. Hal ini tidak sama dengan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Keadilan humanistik, yang dikembangkan oleh manusia, telah menjauhkan pemahaman spiritual dan terlalu berfokus pada manusia, mengangkat mereka ke status pribadi. Meskipun demikian, konsepsi Islam tentang keadilan menempatkan manusia pada peran yang seharusnya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. (2020, Mukaromah)

E. Perekonomian pada masa daulay Abbasiyah

Pemerintahan Dinasti Umayyah kemudian digantikan oleh Dinasti Abbasiyah. Karena semua raja dinasti tersebut, termasuk pendirinya, merupakan keturunan dan cucu Abbas, saudara laki-laki dari ayah Nabi Muhammad, maka dinasti ini dikenal dengan nama Khilafah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Abbas yang lahir di Humaimah pada tahun 104 H. Ia dinobatkan sebagai khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awwal tahun 132 H. Dinasti Abbasiyah berkuasa pada tahun 750 hingga 1258 M. Yatim Badri (2012)

Jika Abdul Abbas as-Saffah dan al-Mansur meletakkan dasar-dasar Khilafah Abbasiyah, maka pada masa pemerintahan tujuh khalifah



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

berikutnya—al-Mahdi, al-Hadi, Harunal-Rashid, al-Ma'mun, al-Mu'tasim, al-Wathiq, dan al-Mutawakkil—kemudian mencapai puncak kejayaannya. Pergeseran politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap era kepemimpinan periode Kekhalifahan Abbasiyah tercermin dalam pola pemerintahan. Berbagai adat istiadat dan metode ekonomi digunakan sepanjang Dinasti Abbasiyah sesuai dengan tuntutan zaman.

1. Al-Mahdi (775-785 M)

Ketika ayahnya mencapai akhir hayatnya, al-Mahdi, yang namanya berarti "Pemimpin yang Baik" atau "Penebus," diangkat menjadi khalifah. Kebijakan raja-raja sebelumnya dipertahankan selama pemerintahannya yang tenang. Selama pemerintahan al-Mahdi, kerja sama dengan kaum Muslim Syiah yang hadir di kekhalifahan terjadi. Selama pemerintahan al-'Abbas sebagai wazir, anggota keluarga Barmakid menjadi terkenal dan mulai melayani sebagai penasihat Khalifah. Mereka juga memperoleh pengaruh yang signifikan di bawah al-Mahdi dan bekerja bersama Khalifah untuk membangun masyarakat yang berkembang pesat. Dinasti Abbasiyah. Dengan mendirikan departemen baru untuk militer, sistem peradilan, dan perpajakan, al-Mahdi melanjutkan pengembangan pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Setelah pengangkatan qadi, atau hakim, undang-undang yang berkaitan dengan orang non-Arab disahkan.

Aktivitas ekonomi terus membaik di bawah pemerintahan al-Mahdi, sebagaimana dibuktikan oleh kemajuan di bidang pertanian melalui pengelolaan air yang lebih baik dan peningkatan ekstraksi komoditas termasuk besi, tembaga, perak, dan emas. Selain itu, ada banyak pendapatan dari perdagangan silang antara wilayah Timur dan Barat. Pelabuhan Basra sangat penting. Oleh karena itu, ekonomi Dinasti Abbasiyah didasarkan pada perdagangan, pertambangan, dan pertanian. Pemerintah memperluas lahan pertanian, membangun



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

bendungan dan kanal, melindungi hak milik, dan mengurangi pajak atas produk pertanian dalam upaya untuk meningkatkan industri pertanian. Namun, untuk meningkatkan industri perdagangan, pemerintah membangun tempat istirahat untuk karavan dagang, menggali sumur, mendirikan sejumlah kapal komersial, dan menjaga keamanan pelabuhan dan garis pantai.

2. Harun Ar-Rasyid (786-809 M)

Di bawah Khalifah Harun Al-Rashid, perekonomian Kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat. Ia mendirikan Baitul Maal dan menunjuk seorang Wazir untuk mengawasi sejumlah diwan guna mengawasi keuangan pemerintah. Hasil Baitul Maal digunakan untuk gaji militer, pegawai negeri, penelitian ilmiah, dan penerjemahan literatur Yunani. Khalifah meningkatkan aliran keuangan negara selama pemerintahannya dengan mendirikan Baitul Maal dan menunjuk seorang wazir untuk mengepalai beberapa departemen, termasuk:

- a. Diwan al-khazanah bertanggung jawab atas perbendaharaan negara secara keseluruhan;
- b. Diwan al-azra, yang bertanggung jawab atas kemakmuran pertanian negara; dan
- c. Peralatan angkatan bersenjata berada di bawah yurisdiksi Diwan al-khazanah as-siaah (Nunzairina, 2020)

Lebih jauh, Khalifah Harun memerintahkan Abu Yusuf untuk menulis al-Kharaj, sebuah buku yang menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena ia sangat khawatir tentang masalah pajak. Sektor keagamaan pada saat itu menyediakan sumber-sumber pemikiran ekonomi berikut:



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- a. Perdagangan dan Industri: Para khalifah Abbasiyah menempatkan perdagangan sebagai prioritas tinggi di samping pertanian dan industri. Di sepanjang rute perdagangan, mereka membangun rumah dan sumur, serta pasukan dagang dan angkatan laut untuk menjauhkan bajak laut dari garis pantai negara tersebut.
- b. Pembangunan daerah merupakan hasil dari pembangunan Khilafah yang stabil, yang juga berdampak signifikan pada pertanian. Produksi berbagai produk pertanian berkualitas tinggi dan beragam, termasuk beras, sereal, sayur-sayuran, kakao, minyak zaitun, dan tanaman industri seperti kayu dan hasil hutan, terus digalakkan sepanjang tahun.
- c. kemajuan penelitian pertanian. Pada awalnya, para Khalifah Abbasiyah mendukung dan menghargai para petani, bahkan mengurangi pajak atas hasil pertanian mereka dan akhirnya menyingkirkan mereka sepenuhnya, berbeda dengan para Khalifah Umayyah yang menganiaya dan mengenakan pajak yang tinggi kepada mereka.
- d. Pendapatan dari Pemerintah Nasional:
Pendapatan negara berasal dari pajak pertanian, selain dari sektor komersial, pertanian, dan industri. Pajak pertanian dapat dibagi menjadi tiga kategori: Al-Muhasabah, yang didasarkan pada kuantitas tanah yang dimiliki dan bukan pada hasil produksinya; Al-Muqasamah, yang didasarkan pada hasil produksi tanah; dan Al-Qasamah, yang didasarkan pada kesepakatan. (Suherli dkk., 2022)



F. Relevansi Perekonomian Pada Masa Daulah Abbasiyah di Masa Modern

Potensi ekonomi Islam saat ini sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi era Abbasiyah, terutama berkenaan dengan ajaran yang mengutamakan prinsip-prinsip Islam:

1. **Perdagangan:** Strategi perdagangan pada masa Abbasiyah sangat aktif dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Para pedagang mendirikan praktik perbankan Islam seperti al-wakalah, atau surat kuasa, dan al-sarf, atau pertukaran uang tunai, setelah mengembangkan hubungan komersial mereka di darat dan laut. Perkembangan perbankan Islam, keuangan Islam, dan perdagangan internasional berdasarkan hukum Islam semuanya menunjukkan potensi dan kekuatan perdagangan Islam saat ini. Farah (2022)
2. **Inovasi dan Kreativitas:** Ilmuwan dan peneliti Muslim membuat langkah besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik selama Zaman Keemasan sains dan inovasi Islam di masa Kekhalifahan Abbasiyah. Saat ini, potensi ekonomi Islam bergantung pada kecerdikan dan inovasi dalam memproduksi barang dan jasa yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keberlanjutan, halal, etika, dan konsistensi.
3. **Kewirausahaan:** Munculnya elit wirausaha dan manajer bisnis sepanjang era Abbasiyah sangat penting bagi perluasan ekonomi. Selama masa itu, pemilik bisnis Muslim berperan dalam memperluas perusahaan mereka dan menciptakan lapangan kerja. Perluasan usaha kecil dan menengah yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti mudarabah dan musyarakah



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

(kemitraan), saat ini menghadirkan peluang kewirausahaan dalam Islam

4. Pertanian dan Irigasi: Selama Kekhalifahan Abbasiyah, sektor pertanian maju dengan bantuan teknik irigasi yang sangat efisien. Pertanian modern dan pengelolaan air yang optimal secara otomatis meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan pangan, yang menunjukkan potensi ekonomi sektor pertanian bahkan hingga saat ini. Pengelolaan irigasi yang maju, penciptaan dan penerapan teknologi untuk membantu pertanian, dan pertumbuhan lahan pertanian merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini.
5. Sistem Perpajakan: Untuk membiayai kebutuhan negara di seluruh Kekhalifahan Abbasiyah, teknik pemungutan pajak seperti zakat, kharaj, dan jizyah digunakan. Pajak merupakan sistem pajak yang efisien, efektif, dan adil yang menciptakan pendapatan negara dan mewakili potensi ekonomi saat ini. Pengelolaan dan undang-undang pajak yang efektif, administrasi pajak yang lebih baik, dan inisiatif untuk memerangi korupsi merupakan beberapa sumbernya.

(Kamilla Dieke, Dieke Husna, 2023)

4. Simpulan

Dinasti ketiga dalam sejarah Islam, Dinasti Abbasiyah, dianggap oleh para sejarawan sebagai puncak perkembangan masyarakat Islam dan periode ketika budaya Islam berada di puncaknya. Sebuah peradaban Islam baru muncul pada masa ini, yang menjadi contoh bagi peradaban di kotakota lain di seluruh dunia. Baghdad didirikan sebagai pusat intelektual oleh Kekhalifahan Abbasiyah. Dari tahun 132 H, atau 750 M, hingga 657 H, atau 1075 M, Kekhalifahan Abbasiyah merupakan kekaisaran Islam yang mencapai puncak kemajuan di sejumlah bidang, termasuk pemerintahan,



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

sistem ekonomi, sains, dan keuangan. Ribuan volume terjemahan beberapa ilmu ke dalam bahasa Arab dihasilkan pada masa ini. Setelah jatuhnya Dinasti Umayyah pada tahun 750 H, keluarga Abbasiyah mendominasi dunia Islam. Negara ini didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Daftar Pustaka

- Abdul Qoyum dkk,(2021) Sejarah pemikiran ekonomi Islam, Departemen Ekonomi dan Keuangan syariah- Bank Indonesia, (Edisi pertama juni, Jakarta)
- Alimuddin, A., Putri, F. M. E., Atasoge, I. A. Ben, & Alvia, R. (2022). Baitul Mal Dan Ghanimah Studi Tentang Ijtihad Umar Bin Khattab Dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 31–44.
- Addin, Fakultas, Iain Syekh, and Nurjati Cirebon, ‘Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon 25’, 25–50
- Ajid.Pdf’ Dan, Umayyah, and Bani Abbasiyah, ‘At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9, No.2, 2020 | 66’, 9.2 (2020), 66–82
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, ‘Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period’, 1.2 (2021), 228–44
- Dieke, Dieke Husna Kamilla, ‘Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini’, *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4.2 (2023), 117–26
<<https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>>
- Farah, N. (2022). Perkembangan Ekonomi Dan Administrasi Pada Masa Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah. *Tarikh al-Islamy*, 3(1), 25–50.
- Fakultas Addin, Iain Syekh, and Nurjati Cirebon, ‘Penulis Adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Addin IAIN Syekh Nurjati Cirebon 25’, 25–50.
- Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, ‘Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Islamic Civilization and Thought in the Abbasid Period’, 1.2 (2021), 228–44.
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam, ‘Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia’, 9.01 (2023), 697–704
- Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, ‘Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Ubaid Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam Di Indonesia', 9.01 (2023), 697–704. Umayyah Dan and Bani Abbasiyah, 'At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9, No.2, 2020 | 66', 9.2 (2020), 66–82.
- Mukaromah, L. A. (2020). Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah). *'At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman.*, 9(2), 66–82.
- Marasabessy, R. H. (2022). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. In *Jurnal Asy-Syukriyyah* (Vol. 16, Nomor 1). <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>
- Nunzairina, N. (2020). Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 93–103. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i1.4382>
- Suherli, I. R., Jubaedah, D., & Pribadi, P. (2022). Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara Imam Al Mawardi ' S Thought About Economic Activities Supervisory Institutions To Improve The Country ' S Economy. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Binsin*, 5(2), 91–102.
- Vol, Business U B S, 'No Title', 12.5 (2023), 2859–72
- Yulianti, Rahmani Timorita, 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf', 1–26